

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Achmad, A., & Maskanah, U. (2020). *Hukum Acara Perdata* (Edisi Pertama). Logoz Publishing.
- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Edisi Pertama). Kencana.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Edisi Pertama). Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Asikin, H. Z. (2015). *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Edisi 2). KENCANA.
- Asnawi, M. N. (2013). *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia* (Edisi Pertama). UII Press Yogyakarta.
- Mahardika, R. V., Prakoso, B., & Hariyani, I. (2022). *Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan (Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha)* (Edisi Pertama). UM JEMBER PRESS.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Ramadani, F. E. (2022). Konflik Sosial Perebutan Lahan Perkebunan. *Paradigma*, 11(1), 1–34. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511719899.021>
- Santoso, A. P. A. (2022). *Hukum Acara Perdata* (Edisi Pertama). PUSTAKABARUPRESS.
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Edisi Pertama). Sinar Grafika.
- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian* (Edisi Kesepuluh). PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2003). *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Edisi 31). Intermasa.
- Subekti. (2007). *Hukum Pembuktian* (Edisi 16). Pradnya Paramita.
- Supriadi. (2006). *Hukum Agraria* (Edisi Pert). Sinar Grafika Offset.
- Sutedi, A. (2007). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya* (Cetakan Pertama). Sinar Grafika.

Syafaat, M. R. (2022). *Sertifikat Tanah Adalah Bukti Kepemilikan Hak Terkuat dan Terpenuhi*. Eureka Media Aksara.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Herzien Indlandsch Reglement (HIR)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan

C. SUMBER LAIN

Asmara, T. T. P., Murwadi, T., & Nugroho, B. D. (2020). Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 109–126. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.712>

Bahri, N. A. (2019). Bumi dan corporate social responsibility. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 3(1), 37–48. <https://doi.org/10.34202/imanensi.3.1.2018.37-48>

Dewantara, A., & Karyoto. (2023). Analisis Hierarki Hukum Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Pasca Diberlakukannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 (Studi Kasus Di Pemerintah. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 167. <https://doi.org/10.32503/mizan.v12i2.4845>

Febriana, N. T., & A. M. D. (2022). Langkah Hukum Terhadap Sengketa

- Tumpang Tindih (Overlapping) Atas Hak Sertifikat Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 181 / B / 2020 / Pt . Tun . Sby). *Jurnal Judiciary*, 11(1), 102–117.
- Huda, N. (2021). Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 550–571. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art5>
- Kilimanjaro, H., Ayu, I. K., & Paramit, P. P. (2025). KEPASTIAN HUKUM KUTIPAN BUKU LETTER C DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH. *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 31(1), 11172–11204.
- Kurniati, K. (2023). Telaah Normatif Penerapan Peraturan Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Sertifikat Hak Atas Tanah Tumpang Tindih (Overlapping) Di Kabupaten Banyuasin. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 29(1), 11–20. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v29i1.97>
- Laturette, A. I. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan. *Sasi*, 27(1), 102. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.504>
- Lie, E. S., Soepeno, M. H., & Koesumo, A. T. (2023). Implikasi Hukum Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata. *Lex Privatum*, XI(3), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/>
- Lutfulloh, Z., & Donri, W. (2021). Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (Iup) Pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangihe. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(2), 175–194. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.2031>
- Murni, C. S. (2020). *Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan*. 6(24), 129–144.
- Oktaviani P, A., & Harjono. (2019). Kekuatan Pembuktian Surat Letter C Dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah di Persidangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Perkara No: 816 K/Pdt/2016). *Jurnal Verstek*, 7(1), 41–46. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/30038/20384>
- Pahlevi, K., Prananingtyas, P., & Lestari, S. N. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) Ditinjau Dari Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–13.
- Paksi, T. F. M., Suteki, & Setiawati, T. W. (2017). Rekonstruksi Kebijakan Publik Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Berbasis Sustainable Development. *Diponegoro Law Journal*, 6(3), 1–21.

- Rais, M. T. (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 15(2), 1–20. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>
- Saputro, A., Nafia, Z. I., & Hindiawat, W. (2022). Tertib Administrasi Pertanahan Desa Di Desa Tidu Kec. Pohjenrek Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 3(4), 1–20.
- Sari, A. W. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Vestek*, 9(2), 280–288.
- Sari, N., & Kusuma, N. (2020). Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Akses*, 06(3), 207–214.
<https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/akses/article/view/695%0Ahttps://www.ojs.unr.ac.id/index.php/akses/article/download/695/631>
- Sayita, V. A., Dewi, I. G. A. G. S., & Prasetyo, A. B. (2022). Akibat Hukum Pelepasan Tanah Kas Desa Terhadap Gaji Perangkat Desa Yang Terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Surakarta Di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 11(4).
<https://doi.org/10.14710/dlj.2022.34958>
- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2021). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.758>
- Trisnawati, P. A. (2020). *Jenis –Jenis Peralihan Hak Atas Tanah*. Pdb-Lawfirm.Id. <https://pdb-lawfirm.id/jenis-jenis-peralihan-hak-atas-tanah/>
- Usman, A. H. (2022). Pendaftaran Hak Atas Tanah Lebak Lebung Warisan Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1367. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2466>
- Wahid, A., & Rohadi. (2021). Digitalisasi Registrasi Desa (Letter C) Tanah Dalam Optimalisasi Pelayanan Di Tengah Pandemi Covid19 Di Pemerintah Desa Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 226–238.
- Wiharifin, ressy F. (2022). Sistem Rekapitulasi Data Letter C Desa Berbasis Website. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 167–178.